

Dokumentasi Wawancara
dengan Ibu Dra. RINING SRI HASTUTI, M.M.
selaku Kapala Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi
Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)



Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Rabu, 21 Mei 2014)

HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKD)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sepengetahuan saya, fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik adalah sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg), sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, disamping itu memang KPE mempunyai fungsi perbankan dimana setiap awal bulan gaji pns langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Iya tentu saja, dalam proses Implementasi Badan Kepegawaian Daerah selalu menunjuk kepada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008. Selain itu BKD selalu berkoordinasi tentang Juklak dan Juklis kepada BKN di Jakarta.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Ya tentu saja, sebelum proses pemfotoan KPE, PNS Kota Bandar Lampung harus memenuhi persyaratan antara lain membawa Fotocopy SK Pangkat Terakhir dan Fotocopy KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Kendala yang dihadapi, terutama yang saya temui antara lain kurang cakupannya pihak ke-3 dalam hal ini PT. Sucofindo sehingga menimbulkan antrian panjang dalam pemfotoan.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya sudah beberapa kali, waktu itu Dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian di Gedung Sumergow.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya Badan Kepegawaian Negara selalu memberikan arahan – arahan tentang hal – hal apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi KPE.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Iya tentu saja bermanfaat, tetapi dalam hal penunjukan pihak ke-3 BKN menyerahkan sepenuhnya otorisasi penunjukan pihak ke-3 Layanan Perbankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Walikota Bandar Lampung.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Pada waktu itu ada 3 bank yang telah mengajukan penawaran kerja sama layanan perbankan antara lain bank Lampung, BNI dan BRI, bahkan Bank Lampung sudah melakukan expose di gedung tapis menyatakan kesiapannya, selanjutnya proses ini terhenti ketika terjadi pergantian Walikota ke Bapak Herman HN.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Pada dasarnya pihak ke-3 sudah menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi Layanan Perbankan tetapi pihak Pemerintah Kota belum ingin melaksanakannya.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Tiga Kali di distribusikan dari BKN.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Iya fungsi utamanya sebagai Konversi Karpeg ke KPE sudah tercapai walaupun Fungsi Perbankan sampai saat ini belum maksimal.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : iya bisa dikatakan demikian.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Iya tentu saja baik SDM dalam hal ini PNS dan teknologinya.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Pada dasarnya SDM yang ada di BKD sudah cukup baik karena didukung oleh lulusan S1 dan S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya sudah dianggarkan pada DPA BKD kota tiap tahunnya.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya tentu saja, seingat saya dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan melalui Loker Pelayanan.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Melalui pertemuan dan Rapat- Rapat serta Surat Edaran ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : - Rapat Koordinasi Kepegawaian
- Surat Edaran
- Loker Pelayanan Informasi KPE

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Masih banyak PNS yang kurang informasi terkait KPE.

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Pada dasarnya proses pemfotoan dilakukan oleh pihak ke-3 yang ditunjuk BKN yaitu PT. Sucofindo jadi kesiapan teknis dalam hal ini teknologi cukup baik.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tentu saja, dengan adanya loket pelayanan kepegawaian dapat dengan mudah memberikan informasi KPE.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Iya beberapa PNS setiap harinya menanyakan Informasi KPE, semisal kapan jadwal pemfotoan KPE.

12. Bagaimana *political will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sejauh ini, keinginan Walikota hanya memfungsikan KPE sebagai Kartu Identitas PNS pengganti KARPEG.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Setahu saya melakukan pemfotoan secepatnya agar semua PNS kota Bandar Lampung memiliki KPE.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Melakukan koordinasi dengan BKN.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik??

Jawab : Pada dasarnya menyambut baik adanya KPE.